

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
(studi Pada Kantor Camat Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

OLEH

UJI YUNITA NUR PANJAITAN

NPM : 08 851 0080

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	11
BAB II. URAIAN TEORITIS.....	13
A. Pengertian Organisasi dan Prinsip Organisasi	13
B. Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi	20
C. Unsur-Unsur Dalam Struktur Organisasi	24
D. Implementasi	25
E. Pendelegasian Tugas dan Wewenang	26
F. Pengertian Tentang Kebijakan	28
G. Aspek-Aspek Kebijakan	30
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Populasi dan Sampel	33
B. Metode Pengumpulan Data	34

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

C. Variabel dan Definisi Operasional	35
D. Teknik Analisa Data	37
BAB IV. KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	38
A. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Syahbandar.....	38
B. Letak dan Geografis.....	38
C. Kependudukan dan Perekonomian.....	39
D. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar.	41
BAB V. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Tugas dan Wewenang Camat Dalam Kaitannya Dengan Pelimpahan Wewenang	48
B. Pendelegasian dan Penarikan Kewenangan	66
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dari keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sistem otonomi daerah juga menempatkan peran yang besar pada di tingkat Kabupaten/Kota. Agar sistem otonomi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan semua pihak maka efektivitas tugas dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah harus dapat mencapai semua jenjang dalam suatu wilayah. Untuk hal yang demikian maka dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu dilakukan pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada pihak kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan menjadi lebih akomodatif dan fleksibel artinya dengan kewenangan yang ada, Camat diharapkan mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat serta mampu melahirkan berbagai kebijakan positif yang menyentuh langsung kepada praktek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat.

Untuk mengefektifkan sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota, yang merupakan tindak lanjut dari implementasi kebijakan otonomi daerah, maka camat sebagai perangkat daerah menerima pelimpahan dari Bupati/walikota. Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam bidang pemerintahan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Kewenangan tersebut merupakan salah satu aspek yang melekat pada tugas suatu organisasi pemerintahan tingkat kecamatan yang mempunyai tugas pokok sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta fungsinya tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok para pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan pada masyarakat.

Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada camat di tingkat kabupaten/kota semata-mata dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, dimana ketiga aspek tersebut merupakan tugas utama dari pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pemerintah perlu dilengkapi dengan kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan termasuk kebijakan untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tingkat organisasi pemerintah yang lebih rendah. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dalam Wahab menyebutkan bahwa “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan lembaga pemerintahan yang mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses impelementasinya”¹.

Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa impelementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan itu, akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah impelementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pembahasan kebijakan publik (public policy).

Mengingat begitu besarnya tanggungjawab organisasi publik, maka sangat perlu membangun kualitas, hal ini disebabkan karena organisasi publik berhadapan dengan masyarakat yang banyak berharap akan pelayanan yang memuaskan. Kualitas pelayanan pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan pemberi pelayanan, namun pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan kualitas pelayanan belum memenuhi harapan pelanggan, hal ini diakibatkan tidak konsistennya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan masing-masing.

¹Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 51.

Bidang kewenangan yang dilimpahkan penandatungannya kepada camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 2534 Tahun 2005. Secara teknis belum optimalnya kebijakan ini dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah segala aspek yang ditimbulkan atau yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan yang datang dari dalam birokrasi pemerintah kabupaten itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah segala aspek yang ditimbulkan oleh kondisi dan konsistensi masyarakat.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul untuk penulisan tesis ini, yakni : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT (Studi Pada Kantor Camat Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai)”**.

B. Perumusan Masalah

Sebelum penulis mengemukakan masalah pokok dalam penulisan ini, ada baiknya penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian masalah. Karena masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kebingungan akan sesuatu hal.

Dengan adanya permasalahan ini juga maka akan dapat diarahkan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan dengan tujuan dasarnya yaitu untuk memecahkan masalah yang diajukan tersebut. Sehingga dengan hal tersebut akan

dapat dikurangi pembahasan-pembahasan yang tidak berhubungan dengan tulisan ini.

Mengingat judul merupakan lingkup yang cukup luas maka penulis berusaha memfokuskan penelitian sehingga upaya untuk mencari jawaban akan terlaksana dengan baik. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat direalisasikan.
- b. Apakah bentuk pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat tersebut dapat meningkatkan kinerja pihak kecamatan.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini dibatasi pada :

1. Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat.
2. Wilayah penelitian di batasi pada Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Tahun penelitian adalah 2011.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan kata lain, tujuan penelitian yakni menerangkan suatu fenomena yang dihubungkan dengan fenomena lainnya.

Sumantri mengatakan “Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang akan dirumuskan”.²

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat direalisasikan.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat tersebut dapat meningkatkan kinerja pihak kecamatan.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memperkaya khasanah penelitian tentang ilmu administrasi negara khususnya dalam bidang administrasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait khususnya sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintahan dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dengan tujuan meningkatkan kinerja pihak kecamatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hal yang mutlak dalam penelitian ilmiah, Dimana nantinya hal tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang merangkaikan segenap masalah dengan berbagai teori yang dianggap mempunyai

²Jujun Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 313.

relevansi langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi menjelaskan bahwa “kerangka pemikiran adalah sekumpulan konsep yang disusun sebagai landasan berfikir dari sudut mana masalah yang telah dipilih yang akan disoroti”.³

Jadi kerangka pemikiran merupakan inti dalam suatu penelitian yang memuat dasar-dasar secara teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara akan senantiasa memerlukan aturan dan keteraturan yang sistematis dan jelas, sehingga setiap unsur yang terkait sebagai suatu sistem dapat saling memahami dan menghormati, serta roda pemerintahan dapat berjalan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, hakekat pemerintahan mengemban tiga fungsi utama yakni :

- 1) Fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- 2) Fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan
- 3) Fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan ekonomi dan moneter.

Implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagai-

³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Bandung 1990, hal. 71.

mana dikutip oleh Wahab menyatakan bahwa “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur / mengatur proses implementasinya”.⁴

Sehubungan dengan pendapat yang telah dikemukakan di atas, Meter dan Horn dalam Wahab menyatakan pula bahwa setiap implementasi kebijakan, akan dipengaruhi oleh variabel-variabel :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber-sumber kebijakan,
- 3) Ciri-ciri atausifat badan/instansi pelaksana,
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana,
- 5) Sikap para pelaksana,
- 6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, sehingga camat tidak lagi menjadi kepala wilayah yang memiliki otoritas kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan umum. Namun di pihak lain undang-undang ini mempunyai salah

⁴Abdul Wahab Solichin, *Op.Cit*, hal. 51.

⁵Ibid., hal. 68.

satu tujuannya untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai konsekuensi logis untuk mencapai tujuan tersebut, Camat perlu dilengkapi dengan suatu kewenangan. Menurut Wasistiono, apabila dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atribut dan kewenangan delegatif. Oleh karena menurut Wasistiono (2002 : 28), dalam rangka pelaksanaan tugas camat sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota, dimana pendelegasian kewenangan dimaksud akan bervariasi sesuai dengan kondisi obyektif dari kecamatan tersebut.

Pendelegasian wewenang kepada suatu organisasi publik yang lebih rendah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman bagi pendelegasian otoritas, tanpa penguasaan yang cermat dalam praktek, maka delegasi dapat menjadi tidak efektif. Berkaitan dengan pelimpahan wewenang bahwa mendistribusikan wewenang formal ke seluruh struktur organisasi merupakan keputusan kunci dalam organisasi. Stoner et. al mengemukakan bahwa :

Delegasi adalah memberikan wewenang formal kepada orang lain (Kekuasaan sah) dan tanggungjawab untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Pendelegasian wewenang oleh manajer kepada karyawan adalah perlu agar organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena tidak ada seorang manajerpun yang dapat menyelesaikan sendiri atau melakukan supervisi menyeluruh terhadap semua hal yang terjadi dalam organisasi.⁶

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang, kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tugas dan

⁶James A.F. Stoner, *Manajemen*, Terjemahan Alfonso Sirait, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 47.

fungsi dari birokrasi pemerintah. Berbagai karakteristik pelayanan yang dimiliki oleh pemebri layanan, sebagaimana diutarakan oleh Nisjar ada beberapa indikator dari pelayanan yaitu :

- 1) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur, birokrasi yang sangat berlebihan, berbelit-belit.
- 2) Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada suatu kejelasan dan kepastian bagi pelanggannya dalam menerima pelayanan tersebut.
- 3) Pemberian pelayanan senantiasa diusahakan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 4) Memberikan pelayanan senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.
- 5) Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan secara terbuka.
- 6) Dalam berbagai kegiatan pelayanan baik teknis maupun administrasi, pelanggan selalu diperlakukan dengan baik.⁷

F. Hipotesis

Hipotesis adalah “ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data “. ⁸

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai sebagai berikut “pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati Serdang Bedagai

⁷Nisjar Karhi dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 123.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 39.

kepada Camat Tebing Syahbandar akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pihak kecamatan jika dijalankan dan dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan dari Kecamatan Tebing Syahbandar sendiri”.



BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Organisasi dan Prinsip Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Pengorganisasian (organizing) merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang efektif. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib, struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk organisasi harus memperhatikan berbagai azas organisasi.

Azas-azas organisasi berperan dua macam yaitu pertama sebagai pedoman untuk membentuk struktur organisasi yang sehat dan efisien, dan peranan kedua sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan proses organisasi agar dapat berjalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

lancar.

Menurut Azwar “Organisasi adalah suatu sistem yang mengatur kerjasama antara dua orang atau lebih, sedemikian rupa sehingga segala kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.⁹

Pengertian struktur organisasi menurut Stoner yaitu :

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam suatu perusahaan. Suatu struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana berbagai tingkatan aktivitas berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tertentu ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktivitas kerja. Ia juga menunjukkan hirarki organisasi dan struktur organisasi, dan struktur wewenang, serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta mengkoordinasikan hubungannya dengan lingkungan.¹⁰

Selanjutnya menurut Reksohadiprodjo dan Handoko “struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung-jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya”.

Berbicara tentang struktur organisasi tidak akan terlepas dari organisasi itu sendiri, karena keterikatannya itu maka disini juga diuraikan pengertian tentang organisasi.

⁹Azrul Azwar, *Administrasi Perusahaan*, Binarupa Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996, hal. 16.

¹⁰James A.F. Stoner, *Op. Cit*, hal. 22.

¹¹Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Cetakan kelima, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1998, hal. 34.

Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah tata hubungan antara orang – orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung-jawab. Untuk tercapainya tujuan bersama maka setiap orang dalam organisasi harus jelas tugas, wewenang dan tanggung-jawab serta pertanggung-jawaban, hubungan dan tata kerjanya.

Sutarto menjelaskan pula bahwa “organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.¹²

Selanjutnya menurut Siagian Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarkhi dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut karyawan.¹³

Dari beberapa definisi serta pengertian yang dikemukakan beberapa ahli di atas secara umum dan elementer dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dasar daripada organisasi adalah :

- a. Sebagai wadah atau tempat kerja sama.
- b. Proses kerja sama sedikitnya antara dua orang atau lebih.
- c. Adanya pengaturan hubungan.
- d. Ada tujuan yang hendak dicapai.

¹²Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Cetakan Kesembilan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 36.

¹³Siagian, Sondang P, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Cetakan Kesembilan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000, hal. 20.

2. Prinsip Organisasi

Manullang menjelaskan bahwa agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan atau dipedomani beberapa azas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

- a. Perumusan tujuan
- b. Pembagian tugas
- c. Pendelegasian kekuasaan
- d. Rentangan kekuasaan
- e. Kesatuan perintah dan tanggung-jawab
- f. Tingkat-Tingkat pengawasan
- g. Koordinasi¹⁴

ad. a. Perumusan Tujuan

Bila kita melakukan sesuatu aktivitas, maka pertama harus jelas apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Demikian pula bila mengorganisasi atau membuat suatu skema organisasi atau membentuk badan, maka pertama harus dirumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuannya dan harus diterima dan diyakini oleh setiap pejabat dalam organisasi sampai kepada pejabat yang berkedudukan paling rendah. Dengan kata lain penyusunan organisasi tersebut dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

ad. b. Pembagian tugas

Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih amat besar. Dengan pemba-

¹⁴Manullang, M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 87.

gian tugas, pekerjaan, ditetapkan sekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Dengan adanya pembagian tugas yang baik, maka bagian akan dapat mengetahui secara jelas tugas dan tanggung-jawab masing-masing di dalam organisasi tersebut sehingga kemungkinan tumpang tindih dalam pekerjaan tidak akan terjadi.

ad. c. Delegasi kekuasaan

Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan (pelimpahan wewenang). Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pimpinan untuk melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya, sebab dengan delegasi kekuasaan seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian dan pengetahuannya yang terbatas. Bahkan dapat dikatakan delegasi kekuasaan merupakan salah satu jalan utama bagi setiap pemimpin untuk percaya akan diri sendiri. Untuk itu di dalam penyusunan organisasi maka prinsip ini perlu dikemukakan.

ad. d. Rentangan kekuasaan

Dengan rentangan kekuasaan dimaksudkan berapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahannya seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi dengan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dalam pengambilan keputusan seorang manajer harus mengidentikkan pekerjaan masalah sesungguhnya. Ia harus mengambil keputusan-keputusan terakhir dalam soal-soal yang berhubungan dengan seluruh kesatuannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

ad. e. Kesatuan perintah dan tanggung jawab

Menurut prinsip ini, maka seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggung jawaban akan pelaksanaan tugasnya. Salah satu motto yang terkenal dari prinsip ini adalah “*No man can serve two bosses*” atau tidak seorangpun dapat melayani dua atasan sekaligus.

Dengan kata lain tidak seorangpun anggota organisasi harus memberikan laporan kepada lebih dari seorang atasan. Oleh karenanya garis-garis saluran perintah dan tanggung-jawab harus dengan jelas menunjukkan dari siapa seorang pejabat menerima perintah dan kepada siapa dia bertanggung-jawab.

ad. f. Tingkatan-tingkatan pengawasan

Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin harus diusahakan sesederhana mungkin mengenai organisasi, selain memudahkan komunikasi pula agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam struktur organisasi. Seorang manajer harus mengawasi jumlah maksimum orang yang dapat dipimpinnya secara efektif.

ad. g. Koordinasi

Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip koordinasi. Adanya pembagian tugas pekerjaan dan bagian – bagian serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi, cenderung timbulnya kekuatan memisahkan diri dari organisasi sebagai keseluruhan.

Oleh karena itu untuk mencegah hal yang demikian haruslah ada usaha mengembalikan gerak yang memisahkan diri dengan usaha koordinasi, yaitu suatu usaha mengarahkan kegiatan unsur organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Usaha yang demikian inilah yang disebut prinsip koordinasi. Dengan adanya prinsip ini kemungkinan tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Dari uraian-uraian di atas maka dapatlah dijelaskan tentang arti pentingnya organisasi dan struktur organisasi. “Organisasi adalah bertujuan untuk mencapai tujuan dimana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri”.

Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat menghasilkan yang lebih baik daripada dilakukan secara perseorangan. Sebagai kerangka dari mekanisme kerja suatu organisasi dimana dapat terlihat dengan jelas hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, batas tugas, wewenang dan tanggung-jawab, hal-hal tersebut dapat tercapai dengan baik apabila perusahaan menerapkan struktur organisasi yang baik dan tepat sesuai dengan kondisi perusahaan.

B. Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi

Bentuk-bentuk organisasi didasarkan atas tujuan dari segi wewenang, tanggung-jawab dan hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan menurut

Sarwoto dapat dibedakan atas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

1. Sistem organisasi garis
2. Sistem organisasi fungsional.
3. Sistem organisasi garis dan staf.¹⁵

ad. 1. Sistem organisasi garis

Sistem ini diciptakan oleh Henry Fayol dari Prancis dan zaman dahulu dipergunakan pada organisasi militer, salah satu prinsip umumnya adalah kesatuan perintah (unity of command) dimana seorang menerima perintah dari seorang atasan.

Masing-masing pemimpin mempunyai bawahan sendiri yang memberikan pertanggung-jawaban langsung atas pekerjaannya. Tidak berhak seseorang pemimpin memerintahkan bawahan pimpinan lain dan pengawasan kepada bawahan tidak lebih seorang (one man one boss).

Kebaikan sistem organisasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem ini sederhana, sesuai untuk perusahaan kecil
- 2) Mudah memelihara disiplin karena adanya unity of command
- 3) Cepat dalam pengambilan keputusan karena jumlah orang yang perlu diajak berkonsultasi masih sedikit
- 4) Masing-masing pekerja mempunyai pembatasan yang tegas terhadap pembagian kerja dan tanggung jawab.

Sedangkan keburukan sistem ini adalah :

¹⁵Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 29.



- 1) Hanya perusahaan kecil yang dapat mempergunakan sistem organisasi garis ini. Jika perusahaan bertambah besar maka sistem ini tidak dapat bertahan lagi. Setiap pemimpin diperlukan pengetahuan yang luas untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan seksama ini dikarenakan pemimpin harus mempunyai pembantu khusus yang dapat membantu memecahkan persoalan dengan memberikan pendapat dan advise.
- 2) Kurangnya koordinasi antara karyawan yang setaraf karena mereka hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan saja
- 3) Timbulnya birokrasi karena antara pelaksana dan pengambil keputusan ada beberapa pimpinan yang harus dilalui oleh perintah atau asal-usul yang dikemukakan bawahan maupun atasan
- 4) Kesempatan bagi para karyawan untuk mengembangkan spesialisasi sangat terbatas
- 5) Seluruh organisasi terlalu bergantung pada seseorang sehingga bila seseorang itu tidak mampu, maka kelanjutan hidup organisasi akan terancam.
- 6) Tidak ada diterangkannya keuntungan dari spesialisasi dan pembagian kerja penuh maka tidak dapat dinikmati hasilnya.
- 7) Pemimpin-pemimpin bagian atau mandor mempunyai tanggung-jawab sangat besar.

ad. b. Sistem Organisasi Fungsional

Pada umumnya yang dimaksud dengan organisasi fungsional adalah organisasi

yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang perlu dijalankan.

Organisasi fungsional pada umumnya digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang pembidangan tugasnya dapat digariskan secara tegas, umpamanya unit produksi, unit pemasaran, unit keuangan, dan lain-lain yang walaupun saling bersangkutan paut namun bidang kegiatannya jelas berbeda.

Kebaikan organisasi fungsional adalah sebagai berikut :

- 1) Pembidangan tugas jelas, sehingga kesimpang-siuran dapat dihindarkan
- 2) Spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin
- 3) Solidaritas begitu juga moral dan disiplin di antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama pada umumnya tinggi
- 4) Koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian yang mendalam mengenai bidangnya.
- 5) Koordinasi yang menyeluruh pada umumnya cukup pada tingkat eselon saja.

Keburukannya adalah :

- 1) Para karyawan terlalu menspesialisasikan diri pada bidang tertentu saja, sehingga sukar untuk mengadakan mutasi tugas atau mutasi tempat tanpa melalui pendidikan yang intensif terlebih dahulu.
- 2) Para karyawan terlalu mementingkan fungsinya saja sehingga koordinasi yang bersifat menyeluruh sukar dilaksanakan.
- 3) Memungkinkan timbulnya rasa golongan yang berlebihan yang sama sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dapat menimbulkan perkotakan-perkotakan ikatan karyawan yang sempit.

ad. c. Sistem organisasi garis dan staf

Di dalam sistem organisasi garis dan staf, dengan adanya garis kekuasaan (line Authority) menyebabkan timbulnya organisasi garis.

Organisasi garis dan staf ini timbul karena digunakannya staf authority condition. Disini pengertian dari staf ialah orang yang diangkat untuk memberikan saran-saran dan bukan perintah.

Sistem organisasi garis dan staf ini diciptakan oleh Harrington Emerson. Kalangan pemerintah, militer dan badan-badan usaha pada saat sekarang ini banyak yang mempergunakannya. Banyak badan-badan usaha mempergunakan sistem ini adalah disebabkan bahwa kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem organisasi garis dan sistem organisasi fungsional, prinsip “ unity of command “ dan prinsip “ spesialisasi “ tetap dipertahankan.

Dengan adanya seorang pemimpin yang bertanggung-jawab atas suatu unit aktivitas dimana para bawahannya memberikan pertanggung-jawaban kepadanya, ini berarti prinsip unity of command.

Adanya para spesialisasi yang terdiri dari anggota-anggota staf pembantu yang memberikan bantuan yang sepenuhnya pada pemimpin, maka tercapailah prinsip spesialisasi.

C. Unsur-Unsur Dalam Struktur Organisasi

Menurut Stoner akan sangat bermanfaat untuk menganalisis struktur organisasi berdasarkan lima unsur berikut :

- a. Spesialisasi aktivitas
- b. Standarisasi aktivitas
- c. Koordinasi aktivitas
- d. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan.
- e. Ukuran unit kerja ¹⁷

Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja (pendepartemen).

Standarisasi aktivitas merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak-dugaan (predictability) aktivitas-aktivitasnya. Banyak dari prosedur ini ditetapkan dengan memformalkan aktivitas dan hubungan dalam organisasi.

Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi sub unit dalam organisasi. Menurut Henry Mintzberg, mekanisme standarisasi memudahkan pengkoordinasian aktivitas, khususnya dalam organisasi dengan pola kerja yang tidak rumit. Akan tetapi, karena pekerjaan berkembang menjadi lebih rumit dan mengkoordinasikan aktivitas. Mekanisme baru harus dikembangkan untuk memadukan kerja dari unit-unit yang saling bergantung.

¹⁷ James A.F Stoner, *Op.Cit.*, hal. 298.

Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan (power). Dalam struktur organisasi yang didesentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi atau oleh para manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, kekuasaan pengambilan keputusan dibagi-bagi di antara orang-orang pada tingkat manajemen menengah dan bawah.

Ukuran unit kerja mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja.

D. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “pelaksanaan, penerapan, hal yang disepakati sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah berupa implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan dari Bupati selaku kepala daerah kepa camat.

Implementasi tersebut mencerminkan adanya perwujudan dari pelaksanaan tugas camat selaku pihak yang menerima pelimpahan tugas, dan diwujudkan dalam bentuk rencana dan hasil kerja. Implementasi sebagaimana diwujudkan dalam tatanan sistem pemerintahan juga memberikan pengertian tentang adanya perwujudan dari pelaksanaan tugas suatu badan atau instansi dalam tatanan pemerintahan itu sendiri, yang dalam penelitian ini dibatasi pada wilayah kecamatan.

Implementasi tugas camat pada dasarnya adalah merupakan wujud dari adanya pelimpahan tugas dan wewenang dari Kepala Daerah Bupati kepada Camat. Implementasi tersebut berusaha memberikan keadaan camat dalam pelaksanaan tugasnya dan juga pelaksanaan pertanggung jawaban atas tugas yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diberikan.

E. Pendelegasian Tugas dan Wewenang

Semakin besar suatu organisasi maka masalah yang dihadapinya semakin banyak dan semakin kompleks pula, sehingga dengan demikian tugas-tugas pimpinan makin banyak dan makin kompleks pula. Akibatnya jika pimpinan menangani seluruh tugas-tugas yang menjadi bebannya sudah pasti hasilnya kurang efektif dan efisien.

Dalam keadaan yang demikian maka pimpinan memerlukan bantuan orang lain untuk dapat menangani sebagian dari tugas-tugasnya yang makin banyak dan makin kompleks tersebut. Tugas-tugas yang diberikan kepada bawahannya hendaknya tugas-tugas yang dirasa kurang begitu penting dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dilaksanakan oleh bawahannya dengan baik. Dengan demikian berarti perusahaan tersebut harus mulai memikirkan masalah pendelegasian tugas dan wewenang.

Dalam kenyataannya banyak pimpinan yang enggan melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang karena masalah biaya atau terlalu percaya pada diri sendiri.

Suatu pendelegasian tugas dan wewenang sebenarnya ditujukan terutama agar efektivitas dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu sebenarnya pendelegasian tugas dan wewenang meskipun menaikkan biaya, akan tetapi bila dilaksanakan dengan baik maka tambahan hasil yang dicapai jauh lebih besar dari pada tambahan biaya untuk melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang. Hal ini berarti bahwa dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

adanya pendelegasian tugas dan wewenang justru akan dapat meningkatkan keuntungan bagi organisasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka untuk melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kemampuan mengkategorikan antara tugas yang penting dan kurang penting.
- Tugas wewenang dan tanggung-jawab harus dikemukakan secara tegas dan jelas sehingga tidak membingungkan bagi si penerimanya.

Sesuatu pendelegasian wewenang akan sulit dilaksanakan apabila penerimaan pendelegasian wewenang tersebut tidak mengetahui secara tegas dan jelas apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawabnya (responsibility). Dengan adanya tugas yang jelas dan tegas, maka mereka akan dapat mengetahui tugas-tugas yang menjadi kewajibannya (responsibility). Selain adanya tugas yang diberikan harus tegas dan jelas, maka dalam melaksanakan pendelegasian wewenang perlu diberikan pula wewenang. Seseorang yang diberikan tugas tanpa wewenang akan mendapatkan kendala dan kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Hal ini penting, sebab tanggung jawab terakhir adalah pada mereka yang memberikan pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip pendelegasian tugas dan wewenang berjalan dengan efektif adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur delegasi harus lengkap dan jelas
- 2) Manajer harus mendelegasikan kepada orang yang tepat.
- 3) Manajer yang mendelegasikan harus memberikan peralatan yang cukup dan mengusahakan keadaan sekitar yang efisien.

4) Manajer yang mendelegasikan harus memberikan intensif agar seseorang mau melaksanakan sesuatu tugas sebaik-baiknya, maka kepadanya harus diberi intensif atau perangsang.

- Kepercayaan.

Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pimpinan harus dapat menilai bawahannya yang akan diberi pendelegasian tugas dan wewenang tersebut. Apabila pimpinan menilai bawahannya kurang mampu akan tetapi masih diberikan pendelegasian tugas dan wewenang maka pada akhirnya tugas-tugas tidak akan beres pada hal tanggung-jawab terakhir tetap pada pimpinan yang melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang, maka dapat juga dikatakan, pimpinan harus mempunyai kepercayaan kepada karyawannya dalam melaksanakan yang diperintahkan kepadanya.

F. Pengertian Tentang Kebijakan

Dalam membicarakan kebijakan dari telaah Administrasi Negara, maka kebijakan tersebut sering di hubungkan dengan perbuatan administrasi negara. Sehingga dari keadaan tersebut maka kebijaksanaan sering diurutkan dengan sesuatu objek, seperti kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan terhadap pelayanan kemasyarakatan.

Dewey sebagaimana dikutip Dunn dikatakan kebijakan adalah “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah”.¹⁸

¹⁸William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 2.

Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijaksanaan. Sama pentingnya dengan itu, analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang benar, masalah yang semula tampak tak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ketika ini terjadi ungkapan tak ada solusi, tak ada masalah dapat diganti dengan ungkapan sebaliknya, masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan.

Menghubungkan pengertian kebijakan terhadap pelaksanaan penelitian ini amatlah sulit karena luasnya skop kebijakan itu sendiri, seperti kebijakan publik, kebijakan keuangan, kebijakan pemerintahan dan lain-lain kebijakan. Tetapi pada dasarnya dari tujuan pelaksanaan penelitian ini maka dapat dibuat sebuah batasan pengertian kebijakan bahwa kebijakan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kebijakan yang lebih mengarah kepada tepat tidaknya kebijakan yang dilakukan. Untuk hal yang demikian maka perlu diadakan analisa kebijakan.

Quade sebagaimana dikutip oleh Nugroho bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan.¹⁹

Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Kita melihat kebijakan Pemerintah untuk melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1988 justru berakhir dengan kolapsnya perbankan di

¹⁹Riant Nugroho, *Kebijaksanaan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal. 83.

tahun 1998. Kita melihat kebijaksanaan pemerintah di tahun 1999 untuk mengizinkan jajak pendapat di Timor-Timur menghasilkan disintegrasi kawasan dan menciptakan konflik akut di antaras sesama bangsa Timor-Timur sendiri.

Analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang lama. Analisis kebijakan berbeda dengan periset kebijakan. Analisis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas, waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Analisis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pimpinan puncak di berbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang.

G. Aspek-Aspek Kebijakan

Aspek-aspek kebijakan adalah unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan pengambilan kebijaksanaan. Disebabkan luasnya kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan bentuk kebijakan yang diambil. Tetapi dalam suatu fase kebijakan, maka aspek-aspek kebijakan tersebut merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemntasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Secara lebih nyatanya maka dapat dilihat aspek-aspek kebijakan tersebut meliputi :

1. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijaksanaan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosisi penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan.

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai mengstimasi akibat dari kebijaksanaan yang ada atau yang diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi.

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko

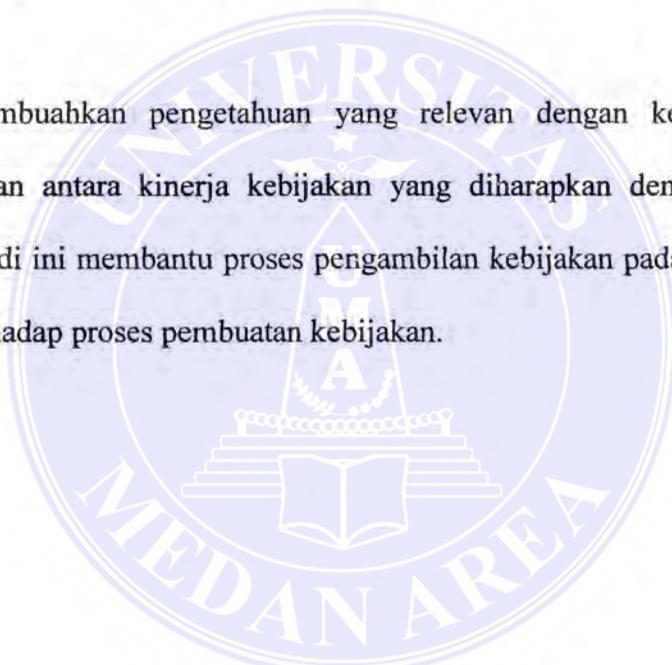
kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijaksanaan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implemmentasi kebijakan.

5. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu proses pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala. Nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karekteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai yang terdapat Kantor Camat Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 30 orang.

Sampel merupakan sejumlah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili dari seluruh populasi.

Sampel menurut Sudjana adalah : adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sample. Sample-sampel itu harus representatif, dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan sampel dapat terjadi karena kurang cermat dalam memahami populasi.²⁰

Sedangkan pengambilan sample berdasarkan pendapat Arikunto berikut ini:

Untuk sekedar *ancer-ancer* maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari:

²⁰Sudjana, *Statistik*, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 167.

- a. kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana
- b. sempit luasnya wilayah pengamayan dari setiap objek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang risikonya besar tentu saja jika sampel besar hasilnya akan lebih baik.²²

Berdasarkan pendapat tersebut maka penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling yakni seluruh pelaku administrasi di Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

Jadi jumlah sample penelitian ini adalah 30 jiwa.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui hasil jawaban kuesioner dan wawancara dari sample penelitian. Data sekunder meliputi bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku, referensi, hasil-hasil penelitian, majalah, artikel, jurnal, ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengelompokkan daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data dari responden dengan membuat daftar pertanyaan dan menyebarkan kepada responden untuk dipelajari sekaligus diberi jawaban oleh responden.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 120.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informasi untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci tentang hal-hal yang tidak mungkin dapat dijalankan responden dalam kuesioner, sehingga dengan adanya wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat variabel yang tergabung ke dalam kerangka konsep, yaitu : Kerangka konsep dalam penelitian lebih mengembangkan pemikiran tentang pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

Gambar 1

Variabel Penelitian Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat



Berdasarkan variabel penelitian, telah dijabarkan variabel-variabel teori untuk memecahkan masalah. Operasionalisasi di dalam penelitian berfungsi untuk memudahkan kesamaan dan kesesuaian di dalam penelitian. Jadi, operasionalisasi variabel penelitian ini sebagaimana dapat dilihat dari kerangka konsep bahwa pelimpahan kewenangan memberikan kondisi kepada pihak camat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada indikator dari pelimpahan wewenang tersebut :

1. Jenis Kewenangan Yang Dilimpahkan

Adalah merupakan jenis-jenis tugas yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat selaku bawahannya.

2. Cakupan Luas dari Kewenangan Yang Didelegasikan.

Adalah berupa luasnya kewenangan yang dapat dilakukan camat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Yang diwenangkan.

Adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan Camat dalam melaksanakan tugas yang wewenang kepadanya.

4. Sarana dan prasarana untuk menjalankan kewenangan.

Adalah merupakan alat-alat yang dipergunakan pihak kecamatan dalam menjalankan tugas yang dibebankan walikota.

5. Bukti langsung.

Adalah kenyataan yang diterima masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh kecamatan.

6. Keandalan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/9/23

Bahwa jenis pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat menunjukkan bahwa pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

7. Daya tanggap

Adalah berupa adanya respon dari pihak kantor kecamatan sewaktu melakukan pelayanan kepada masyarakat.

8. Jaminan

Adalah berupa kondisi yang diberikan oleh Kantor Camat dalam mengantisipasi lemahnya pelaksanaan pelayanan yang diberikan.

9. Empati.

Adalah rasa yang diberikan dan diciptakan dari sistem pelayanan yang dijalankan.

D. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya. Dimana selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan kemudian diberikan masukan-masukan kepada instansi terkait.

BAB IV

KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI

A. Sejarah Singkat Kecamatan Tebing Syahbandar

Di masa penjajahan Pemerintahan Belanda pada sekitar abad 19 wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar sekarang ini terdiri dari dua kerajaan kecil yaitu Kejuruan Syahbandar dan Kejuruan Tebing Syahbandar yang merupakan Protektorat Kesultanan Deli sampai awal Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kesamatan Tebing Syahbandar adalah merupakan Pusat pemerintahan dan Pusat Tanaman Tembakau Deli yang terbesar dengan julukan “Dolar Land”.

Di masa Pemerintahan Republik Indonesia Kejuruan Syahbandar dan Kejuruan Tebing Syahbandar digabung menjadi satu wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar yang saat ini dikepalai oleh seorang Camat hingga sekarang memimpin kecamatan dan menjadi penerus sejarah di Kecamatan khususnya di Kecamatan Tebing Syahbandar.

B. Letak dan Geografis

Wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar mempunyai luas 190,79 Km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah kecamatan merupakan desa

pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10 – 20 M dengan curah hujan rata-rata 243 persen.

Pusat pemerintahannya berkedudukan di Kelurahan Syahbandar, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Perbaungan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

C. Kependudukan dan Perekonomian

Problem kependudukan sudah merupakan masalah sosial yang sangat perlu diperhatikan, baik secara nasional maupun internasional. Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan keadaan penduduk adalah suatu uraian tentang susunan penduduk, di setiap desa dan kelurahan, dalam hal ini yang terdapat di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya akan dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang jenis mata pencarian penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 1
Penduduk Menurut Mata Pencapaian
Tahun 2007

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	PNS	6.566
2.	TNI/Polri	423
3.	Karyawan Swasta	19.769
4.	Pertanian	13.841
5.	Perdagangan	16.280
6.	Nelayan	1.159
7.	Buruh Tani	1.653
8.	Konstruksi	13.841
9.	Jasa	2.200
10.	Pensiunan	4.682
Jumlah		82.372

Sumber: Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai banyak bekerja dan memiliki mata pencapaian di bidang Industri baik itu sebagai buruh maupun pegawai. Sedangkan perdagangan berkedudukan sebagai nomor dua.

Dikarenakan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dekat dengan kegiatan produksi pabrik dan perusahaan maka tingkat mata pencapaian penduduk sebagai pegawai swasta/bumn, buruh dan harian lepas juga tinggi.

Sedangkan jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut agama
Tahun 2007

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	242.765	-
2.	Kristen Protestan	27.558	-
3.	Kristen Katholik	8.495	-
4.	Budha	605	-
5.	Hindu	4.805	-
		284.229	-

Sumber : Kantor camat Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2007

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai lebih dominan beragama Islam yang kemudian diikuti dengan Kristen Protestan. Tingginya penduduk agama Budha adalah dari golongan Warga Negara Indonesia (China).

D. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Oleh karenanya Camat sebagai wakil Bupati di bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah Kecamatan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan :

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan,
- (2) Kepala Kecamatan disebut camat
- (3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat,
- (4) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau walikota,
- (5) Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serdang Bedagai:

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan masyarakat Desa/kelurahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun pola pembagian tugas di Kantor Camat Kecamatan Tebing Syahbandar adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.

04 Tahun 2001 sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Camat di wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati.

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagraraian dan pembinaan politik dalam negeri,
- b. Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur staf. Sekretariat Camat dipimpin oleh seorang sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Camat mempunyai tugas pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut , Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya,
- b. Urusan administrasi keuangan,
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta ketenteraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan,
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil,
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum.
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

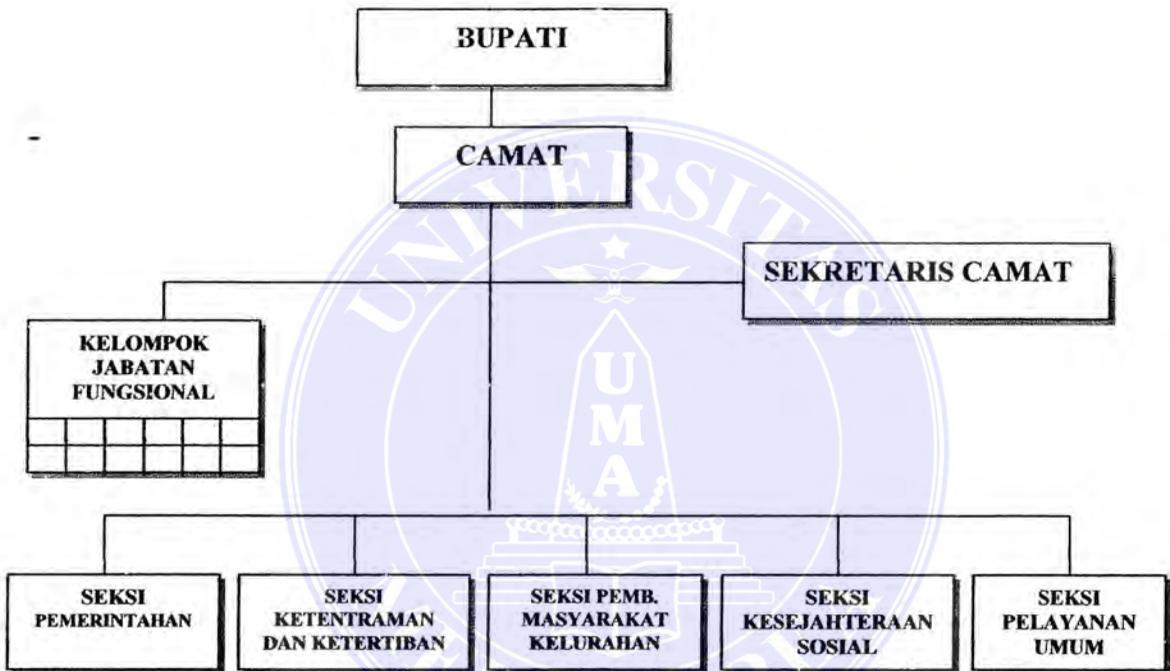
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,
- b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tebing Syahbandar
Kota Medan

PERDA No. : 04 Tahun 2001
Tanggal : 26 Juni 2001



Sumber : Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serdang Bedagai

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat belum direalisasikan secara baik karena terbatasnya ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan serta tidak adanya petunjuk pelaksana dan peraturan daerah dalam hal mendasari kebijakan pelimpahan kewenangan tersebut. Akibatnya adalah pihak camat dalam mengimplementasikan tugas yang diberikan kepadanya masih menunggu petunjuk pelaksana dari Bupati. Dan hal tersebut dapat menghambat tugas camat sehingga kurang efektif bagi meningkatkan kemampuan tugas camat itu sendiri.
2. Bentuk pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat tersebut pada dasarnya dilakukan secara langsung antara Bupati maupun dengan pihak camat. Dan dapat juga secara tidak langsung melalui instansi dinasnya. Tetapi pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada camat memiliki pelaporan dan pertanggung jawaban oleh pelaksana tugas yaitu camat kepada bupati. Bentuk pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat dapat meningkatkan pelayanan, karena camat sebagai pimpinan tertinggi dalam lingkungan kerjanya dan kedudukannya sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari Bupati mengetahui tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Masyarakat juga dapat

secara signifikan mendapatkan pelayanan secara cepat di wilayahnya masing-masing melalui camat tanpa perlu mendatangi kantor bupati.

B. Saran

1. Terlaksananya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan pemberi wewenang kepada yang diberikan wewenang. Berdasarkan persoalan tersebut maka dalam bagian ini penulis menyarankan hendaknya camat tetap menjaga kepercayaan tersebut secara baik, dan kepada pihak Bupati dapat menelurkan kebijakan secara penuh dalam bentuk juklak dan peraturan daerah sehingga implementasinya dapat lebih baik lagi.
2. Agar efektivitas pelimpahan wewenang dapat lebih mencapai tujuan yang diharapkan maka hendaknya sumber daya manusia baik itu camat maupun aparaturnya dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Azwar, Azrul, *Administrasi Perusahaan*, Binarupa Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Cetakan kelima, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1998.
- Kotler, Philip dan Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Manullang, M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Bandung 1990.
- Nisjar Karhi dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Nugroho, Riant, *Kebijaksanaan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Siagian, Sondang P, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Cetakan Kesembilan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Stoner, James A.F. *Manajemen*, Terjemahan Alfonso Sirait, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Sudjana, *Statistik*, Tarsito, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Cetakan Kesembilan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

